

Anak Muda Mental Penjilat?

Tsamara Amany - detikNews

Selasa 20 Maret 2018, 12:26 WIB

<https://news.detik.com/kolom/3926378/anak-muda-mental-penjilat>



Tsamara Amany (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta - "Anak muda kok dekat dengan penguasa? Anak muda harusnya kritis! Jangan mental penjilat!"

Begitulah kritik yang dilontarkan kepada saya dan PSI karena sikap mendukung Presiden Jokowi. Kebanyakan dari mereka berargumen bahwa anak muda atau mahasiswa pada 1966 dan 1998 justru mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah atau yang mereka sebut dengan penguasa. Kritik ini tentu menarik sekali, dan memunculkan pertanyaan di benak saya dan kita semua. Betulkah bahwa seharusnya anak muda zaman now memiliki sikap yang sama dengan anak muda angkatan 66 dan angkatan 98?

Perlawanan yang dilakukan Angkatan 66 dan Angkatan 98 harus dilihat terlebih dahulu konteksnya. Apa yang terjadi pada 1966 tidak lepas dari meledaknya peristiwa berdarah G30S, dan keadaan ekonomi yang begitu buruk. Itulah yang kemudian mendorong terwujudnya Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat yang isinya: pembubaran PKI, pembubaran kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan. Tritura disampaikan melalui demonstrasi-demonstrasi.

Sistem Demokrasi Terpimpin Bung Karno membuat anak muda tak bisa dengan leluasa memberikan masukan. Apalagi Bung Karno sebelumnya telah mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Posisi Bung Karno yang begitu kuat dan kebijakan-kebijakan yang

diambil sepihak seperti membubarkan Konstituante dikritik keras oleh Bung Hatta dalam tulisannya yang berjudul *Demokrasi Kita* pada 1960. Setelah memuat artikel tersebut, *Majalah Pandji Masyarakat* kemudian dilarang terbit lagi.

Pasca Orde Lama runtuh, kehadiran Orde Baru juga tak memberikan banyak ruang bagi masyarakat untuk beraspirasi. Sebaliknya, mereka yang berani beraspirasi mengkritik Presiden Soeharto dan pemerintahannya terancam kehilangan nyawa. Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu masalah besar dalam rezim ini. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) setidaknya mencatat ada 10 kasus pelanggaran HAM yang diduga melibatkan Orde Baru. Beberapa di antaranya adalah kasus Tanjung Priok, Peristiwa 27 Juli 1996, penghilangan secara paksa aktivis pro-demokrasi pada 1997-98, kasus Trisakti, dan masih banyak lagi.

Benang merah yang bisa ditarik dari Orde Lama dan Orde Baru adalah kebebasan yang dibungkam. Oleh karena itu, sangat masuk akal bagi Angkatan 66 untuk turun ke jalan menyampaikan tuntutan. Begitu pula dengan Angkatan 98 yang turun ke jalan menuntut reformasi. Perlawanan dengan cara demonstrasi yang dilakukan kedua angkatan sudah sesuai dengan konteks perjuangan masa itu.

Kini pertanyaan selanjutnya, apakah konteks perjuangan anak muda pada 66 dan 98 harus diikuti oleh anak muda 2018 ini?

Reformasi 98 --terlepas dari segala ketidaksempurnaannya-- telah melahirkan satu kemewahan yang luar biasa: kebebasan. Hari ini di Indonesia, ormas, LSM, dan partai politik bisa berdiri, berpendapat, dan secara keras mengkritik pemerintah. Oposisi bisa berkata apa saja tanpa takut dihabisi. Ruang untuk memberi masukan kepada pemerintah semakin terbuka. Media sosial bisa menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan. Tagar *#ShameOnYouSBY* di *Twitter* pada 2014 lalu mampu membuat Presiden SBY mengeluarkan Perppu agar Pilkada kembali menjadi langsung dan tak dipilih oleh DPRD. Ini menunjukkan bahwa aspirasi publik begitu penting dalam era demokratis ini.

Kini tak sedikit pula kementerian maupun lembaga negara yang memberikan ruang bagi anak muda untuk melaksanakan praktik kerja lapangan atau magang. Ketika ruang untuk menyampaikan tuntutan dan ruang untuk berkontribusi begitu terbuka, mengapa sebagian orang justru ingin mengarahkan anak muda semata-mata untuk melawan pemerintah yang berkuasa, apalagi hanya untuk berdemonstrasi?

Tentu saja demonstrasi merupakan cara yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Tapi,

ketika pemerintahan yang dipilih secara demokratis menjalankan amanat demokrasi dan HAM, tak ada salahnya anak muda mendukung pemerintahan tersebut.

Anak muda juga punya potensi besar yang harus disalurkan ke dalam pemerintahan dan politik kita hari ini daripada sekadar demonstrasi. Menurut data BPS, pada 2020 nanti, 34% masyarakat Indonesia berusia 20 sampai 40 tahun. Dan, pada 2035, masyarakat Indonesia dengan rentang usia tersebut akan melonjak menjadi 64%. Artinya, mayoritas rakyat Indonesia adalah anak muda!

Apakah potensi anak muda sebesar itu hanya akan disalurkan dalam demonstrasi saja ketimbang secara langsung memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bagian dari pemerintahan itu sendiri? Demonstrasi bisa saja didengar, tapi bisa juga tidak. Namun ketika anak muda menduduki jabatan strategis partai politik, menjadi anggota DPR, atau menjadi bagian dari pemerintahan, banyak hal yang kemudian ia bisa lakukan karena ia bagian dari pengambilan keputusan itu sendiri.

Berkaca dari pengalaman sendiri, ketika berada di dalam Pemprov DKI Jakarta, saya dan teman-teman magang saya berhasil melakukan simplifikasi izin usaha hingga ranking Jakarta dalam Ease of Doing Business World Bank naik 16 peringkat dari 167 pada 2015 menjadi 151 pada 2016. Apakah berada di dalam pemerintahan, berkontribusi secara langsung untuk menyederhanakan proses perizinan seperti ini tidak lahir dari rasa kritis terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang selama ini menghambat dunia usaha?

Atas dasar argumen "harus melawan", anak muda disisihkan dalam panggung politik Indonesia. Padahal seharusnya anak muda bisa masuk ke dalam panggung politik Indonesia, masuk ke dalam sistem itu sendiri. Jika tidak, apakah kita sebagai anak muda akan membiarkan politik Indonesia diisi oleh orang-orang yang sama, yang hari ini banyak kita kritik, namun kita justru menarik diri, dan tak melibatkan diri dalam proses regenerasi kepemimpinan politik yang sudah sangat mendesak ini?

Berada di dalam partai politik merupakan sarana untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Politik tidak akan baik dengan sendirinya. Dibutuhkan nyali untuk terjun dan melakukan apa yang selama ini dikritik.

Ketika kita bekerja sama dengan pemerintah, itu bukan karena kita menjilat penguasa. Rasa kritis dan rasa perlawanan tidak harus muncul hanya lewat demonstrasi. Rasa kritis dan rasa perlawanan juga bisa muncul lewat kontribusi yang menghasilkan kebijakan nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Rasa kritis harus muncul dengan mengedepankan

rasionalitas. Bukan asal anti-pemerintah saja.

Ini bukan tahun 1966. Ini juga bukan tahun 1998. Keterlibatan politik dalam bentuk aksi massa atau demonstrasi hadir karena panggilan sejarah masa itu.

Ini tahun 2018. Panggilan sejarah kita sudah berbeda. Ini tahun di mana kebebasan dijamin dan kontribusi dinanti.

"Tapi kalau bicara kebebasan, bagaimana dengan UUMD3 yang baru-baru ini disahkan?"

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang/ Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan/ Dituduh subversif dan mengganggu keamanan/ Maka hanya ada satu kata: lawan! Begitulah kata Wiji Thukul.

Tsamara Amany mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

(mmu/mmu)

Aku yang sedang meng-aku kan diriku

Catatan sehari-hari seorang mahasiswa biasa.

Rabu, 21 Maret 2018

<http://mahasiswaproletar.blogspot.hk/>

Tsamara Amany, Kaum Muda Yang Tersesat Arah

Baru saja saya membaca tulisan Tsamara Amany, pujaan PSI yang selalu dibanggakan itu akibat heroismenya dalam berpura-pura kritis dengan isu kebhinekaan dan KPK dalam melindungi Jokowi. Kok ya saya ngakak sama tulisan Tsamara Amany yang berjudul "Anak Muda Mental Penjilat?"

Bacalah tulisan konyolnya di sini:

<https://m.detik.com/news/kolom/3926378/anak-muda-mental-penjilat>

Tsamara, jangan mengaburkan kontradiksi lah. Masuk ke dalam politik praktis bukan jalan yang tepat atau bahkan justru menyesatkan, karena jelas sebaik apapun dirimu, tidak

sombong dan rajin menabung, kapitalis birokrat tetaplah musuh rakyat dan tak lebih dari sekedar berbagi kue atau sampai pada berebut kekuasaan yang tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu terus menjaga dominasi Imperialis di negara SJSF ini.

Rezim fasis Jokowi-JK yang kian memiskinkan rakyat dan kian membunuh rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi Imperialisme dalam mengeskloitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia demi meraup keuntungan yang berlipat ganda, macam RA-PS dan PP-78, dan banyak lagi kebijakan fasis yang semakin merampas hak demokratis rakyat juga memberangus gerakan rakyat macam UU Ormas, RKUHP dan UU MD37, haruskah didukung pemerintahan boneka?

Kalau terakhir Tsamara mengutip kalimat "Lawan", apa yang dimaksud dengan melawan? Jumlah pemuda sekitar 84 persen. Dengan jumlah yang besar, memang pemuda merupakan kunci utama dalam mengantar negeri ini menuju kemajuan. Namun sayang liberalisasi pendidikan menutup akses pemuda atas pendidikan tinggi, justru pemuda-pemuda dengan jumlah besar ini menghadapi masalah besar yakni pengangguran dan juga calon buruh murah di pabrik-pabrik yang akan dihisap darah dan tenaganya, lalu apa peran politik praktis kepada 84 persen pemuda ini? Mampu membebaskan belunggu penindasan yang dihadapi pemuda kah selama ini? Atau Tsamara secara individualis hanya berbicara tentang kepentingan borjuasi.

Buktinya, keberhasilan Tsamara dan kawan-kawannya yang katanya berhasil melakukan simplifikasi izin usaha sampai dapat peringkat di world bank. Bukan kah itu mengakomodasi kepentingan Imperialis? Tsamara tidak tau kah world bank itu lembaga keuangan internasional milik penindas Imperialisme AS, dengan segala kucuran dana yang digelontarkan untuk memuluskan program-programnya, di negara SJSF atau di negara miskin dan terbelakang lainnya itu nyatanya justru mematikan kehidupan dan penghidupan rakyat miskin akibat pembangunan-pembangunan komersil.

Lihat, bagaimana hasil daya kritismu yang bahkan mendapat peringkat, justru malah menindas rakyat. Ya, Tsamara dan kawan-kawannya berhasil menindas rakyat dalam menopang kepentingan para pemodal untuk merampas tanah rakyat di Jakarta lebih banyak lagi dengan berbagai macam pembangunan komersil. Jika simplifikasi izin usaha ini dikatakan menyasar warga Jakarta dalam mengembangkan bisnis, apa yakin akan mengembangkan usaha kecil disaat kapitalisme monopoli akan terus memonopoli pasar dan mematikan usaha kecil. Dengan demikian sesungguhnya simplifikasi akan sangat menguntungkan bagi pemilik modal dalam mengembangkan usaha komersilnya. Jokowi pula mempercepat izin investasi guna menopang kepentingan Imperialis. Kenapa harus

bangga? Tidak kah merasa dosa dengan rakyat, apalagi perempuan dan anak yang tergusur dari kehidupan dan penghidupannya, padahal Tsamara pernah jadi pembicara di sebuah seminar dengan tema tentang perempuan.

Dengan harga barang pokok yang semakin tinggi dan pencabutan subsidi untuk menopang megaproyek yang menindas, lantas haruskah saya sebagai pemuda mengikuti jalannya pemerintah Jokowi hari ini?

Tsamara mengutip quotenya Wiji Thukul, tapi tau kah Tsamara, Wiji Thukul melawan dengan berjuang bersama rakyat. Karena sejarah di dunia adalah sejarah tentang pertentangan kelas. Maka hanya perjuangan kelas lah yang menjadi satu-satunya cara bagi pemuda mahasiswa, seperti Tsamara, (tapi sayang udah PSI) untuk membebaskan dirinya dari segala bentuk penindasan bersama kelas buruh dan kaum tani dalam melawan dominasi Imperialisme dan feodalisme sebagai topangan terkuatnya, tentunya dengan mewujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional. Dengan hal demikian maka akan tercipta dan terbangunnya ekonomi, politik dan budaya yang maju.

Muak dengan politik? Milenial turun berjuang, kalau Tsamara mau sih sini ikut PEMBARU Indonesia aja ketimbang PSI.

Tsamara mungkin harus berhenti pura-pura berpikir kritis disaat isu yang dibawa sekedar isu kebhinekaan dan membawa kepentingan pertarungan elite negara atas oposisi elitnya. Lelah saya liat Tom n Jerry versi kalian. Sudahlah mbak, mulai lihat kenyataan di desa dan di pabrik kalau memang mau kritis sekalian.

Bagi saya tetap, pemuda tugasnya adalah berjuang bersama rakyat, dengan menyadarkan, mengorganisir dan menggerakkan massa untuk mencapai kemenangan rakyat atas ekonomi, politik dan budaya. Sehingga aksi massa masihlah relevan di dalam keadaan negara yang semakin fasid dan menindas rakyat.

Di Filipina, di India, di Kamboja, di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin, bahkan di Amerika Serikat sendiri, aksi massa dan perjuangan rakyat terus membesar seiring beban krisis yang dilimpahkan Imperialis kepada rakyat di dunia semakin besar dan parah!!

Di Amerika Serikat contohnya. Gerakan mahasiswa AS kini mulai bangkit dan membesar akibat kebijakan Student Loan yang membebani mahasiswa di AS. Kini Jokowi justru ingin menerapkan Student Loan di Indonesia yang pada kenyataannya sama sekali tidak akan membantu mahasiswa dalam menghadapi biaya pendidikan yang tinggi. Saat ini, lebih dari 44 juta warga Amerika menanggung sekitar US\$1,5 triliun hutang pendidikan. Ketika lulus, nilai rata-rata pinjaman yang ditanggung debitur mencapai US\$37.172 atau naik sekitar

US\$20.000 lebih tinggi daripada 13 tahun lalu. Ini berarti sekitar seperempat orang dewasa di AS sedang membayar cicilan pinjaman uang kuliah mereka. Dengan beban hutang yang harus ditanggung, maka mahasiswa AS pula harus bekerja part time atau bahkan fulltime menjadi buruh. Hal ini menghubungkan gerakan mahasiswa dan gerakan buruh di AS, karena menjadi buruh pun mahasiswa masih dihadapkan oleh penghisapan dan penindas atas upahnya. Gerakan mahasiswa di AS pun beriringan dengan gerakan buruh serta memperjuangkan tuntutan-tuntutan buruh di AS.

Selain itu, di Filipina, gerakan rakyat semakin besar dalam memperjuangkan hak-hak demokratisnya dan melawan rezim fasis Duterte. Aksi massa sering mewarnai jalanan di Filipina, jika Tsamara pernah lihat bagaimana aksi massa saat kedatangan Donald Trump di KTT ASEAN di Manila, mungkin Tsamara menyesal telah membuat tulisan tersebut. Kebijakan-kebijakan fasis yang tengah digencarkan oleh Duterte selama ia menjabat sebagai presiden, yakni Martial Law/Darurat Militer, Perang Melawan Narkoba atau bahkan baru-baru ini pemerintahan Duterte baru saja mengeluarkan daftar nama yang berisi 461 nama dan 188 nama lain yang ditandai sebagai teroris. Daftar teror tersebut banyak menasar pimpinan tani, serikat pekerja, aktivis HAM dan masyarakat sipil secara luas yang dengan semangat berjuang melawan rezim Fasis Duterte. Rakyat Filipina yang terus konsisten berjuang demi hak-hak demokratisnya kemudian dihadapkan dengan penculikan, penangkapan, kriminalisasi, pembunuhan bahkan agresi militer yang memakan banyak ribuan korban. Salah satunya adalah pengusiran dan pembunuhan suku Lumad di Mindanao oleh pemerintahan Duterte sebagai usaha pembukaan lahan untuk pertambangan dan perkebunan demi kepentingan investor asing. Namun perjuangan di Filipina tetap berlanjut dan mendapat banyak dukungan dan solidaritas internasional dari berbagai organisasi di berbagai negara.

Di Eropa, kita tentu saja tidak melupakan aksi massa saat pertemuan G20 di Hamburg, Jerman tahun 2017 lalu, kalau mbak Tsamany tau, G20 adalah perkumpulan 19 negara dan satu entitas Uni Eropa yang memiliki perekonomian paling maju. G20 mewakili 85 persen perekonomian dunia dan 2/3 populasi dunia. Fokus agenda pertemuan G20 adalah ekonomi, perdagangan dan ketenagakerjaan, tentu tidak lebih dari konsolidasi Imperialis dan negara-negara kapitalis dalam menggencarkan agenda neoliberalnya terutama di negara-negara miskin dan terbelakang dalam menyelamatkan Imperialisme dari krisis akutnya dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendapat keuntungan berlipat ganda. Kalo mbak Tsamany tau, Demonstrasi di Hamburg berjumlah ratusan ribu orang. Mereka berasal dari lintas negara, organisasi bahkan ideologi. Mereka berasal dari ratusan organisasi. Ada partai politik seperti Die Linke (partai kiri Jerman), Partai Komunis Jerman (DKP), Sosialis Kiri (Jerman), Partai Hijau, Sinistra Italiana

(Kiri Italia), International Socialist Organization (ISO), Partai Marxis –Leninis Jerman (MLPD), dan partai-partai kiri Eropa lainnya. Juga ada koalisi gerakan kiri Eropa yang disebut DiEM25 atau Democracy in Europe Movement 2025, yang didirikan oleh sejumlah tokoh kiri Eropa: Yanis Varoufakis (Mantan Menkeu Yunani), Antonio Negri (Italia), Ken Loach (sutradara kiri Inggris), dan Srećko Horvat (Kroasia). Ada gerakan sosial seperti ATTAC, European Alternatives, Transnational Institute (TNI), PAH (Spanyol), CADTM (Koalisi penghapusan utang illegal), dan masih banyak lagi. Juga serikat buruh, gerakan mahasiswa, organisasi feminis, organisasi petani, dan lain-lain. Terbukti, aksi massa masih relevan.

Sedangkan rakyat Kurdi di Afrin terus dihadapkan oleh penindasan dan agresi militer oleh Pemerintah Turki, Erdogan. Pemerintah telah menyerang beberapa kota Kurdi dengan dalih bahwa itu adalah serangan polisi terhadap teroris. Kenyataannya, ini adalah agresi dan pendudukan yang sengaja dilakukan terhadap suku bangsa Kurdi. Serangan tentara Turki di Afrin dan daerah-daerah sekitarnya sebelumnya mengakibatkan 18 Orang tewas dan 23 Orang luka-luka, bahkan seperti yang disiarkan oleh TV ONE beberapa hari yang lalu bahwa, agresi tersebut sejauh ini telah mengakibatkan 250 warga sipil tewas dimana diantaranya adalah perempuan dan anak-anak, selain itu serangan tersebut juga telah mengakibatkan sekitar 250 ribu orang harus mengungsi. Erdogan sebagai boneka AS akan terus menjaga kepentingan AS atas wilayah tersebut, terutama kepentingan imperialis AS dalam menguasai sumber minyak dan jalur pipa gas di daerah tersebut yang juga ingin terus dipertahankan oleh Rusia. Secara historis memang rakyat Kurdi dihadapkan oleh berbagai serangan oleh pemerintahan Erdogan, namun rakyat Kurdi tidak pernah berhenti dalam memperjuangkan Kemerdekaan, pembebasan, perdamaian dan perjuangan dalam menentukan nasib sendiri.

Situasi yang terjadi di Filipina saat ini dan yang selama ini terjadi di timur tengah maupun yang terbaru di Turkey terkait dengan operasi militer dan terror berdarah yang dilakukan oleh Pemerintah Turkey dibawah pemerintahan Erdogan, serta situasi serupa diberbagai negeri lainnya merupakan aksi-aksi yang berlansung dibawah provokasi, kepemimpinan dan intervensi Imperialisme AS untuk menjamin kelangsungan dominasi dan seluruh kepentingannya di dunia. Di Indonesia, selain melalui berbagai kerjasama sektoral dan isu atas keamanan dan militerisme, Imperialis AS juga menerapkan salah satu skema intervensinya atas kebijakan keamanan di Indonesia yang dikenal dengan COIN (Counter Insurgency) sebagai skema keamanan menyeluruh sejak tahun 2009, termasuk untuk menghambat dan memukul serta memecah-belah gerakan rakyat. Kenyataannya, dibawah pimpinan rezim boneka Jokowi, tindakan kekerasan, kriminalisasi, hingga pembunuhan terhadap rakyat khususnya kaum tani dan suku bangsa minoritas terus meningkat dan

berlansung massif. Pada tahun 2017 lalu, AGRA mencatat bahwa telah terjadi setidaknya 49 kasus kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, mengakibatkan 66 orang ditembak, 144 lainnya luka-luka, 854 ditangkap, 10 terbunuh dan 120 orang dikriminalisasi. Namun hal ini tidak menghentikan semangat kawan-kawan untuk melawan 3 musuh rakyat dan memperjuangkan reforma agraria sejati serta industrialisasi nasional di Indonesia, serta hak-hak demokratis rakyat Indonesia.

Dan masih banyak contoh perjuangan rakyat lainnya di berbagai negara dalam memperjuangkan hak-hak demokratis dan melawan penindasan oleh Imperialisme dan rezim bonekanya.

Lantas Tsamara kenapa bisa bilang bahwa aksi massa itu seolah sudah tidak relevan di tahun 2018? Dengan perjuangan rakyat di dunia yang justru kian meningkat, Tsamara ini kok malah menegasikan kenyataan tersebut? Jelas, pikiranmu tidak objektif Tsamara! Belajarlah berjuang dengan klas buruh dan kaum tani agar pikiranmu tidak kabur, jangan malah belajar sama Jokowi untuk politik 2019, politik borjuasi.

Saya bukan anti partai, tapi memang tidak ada satupun partai Indonesia di bawah dominasi Imperialis yang akan berani menyentuh isu perampasan dan monopoli tanah, politik upah murah, penggsuran dan isu rakyat lainnya. Akan sulit dalam berjuang melalui politik praktis, di saat, di negeri SJSF ini, Imperialisme masih asik bercokol dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang belum tinggi atas 3 musuh rakyat. Kita harus mampu secara jelas memetakan mana yang lawan dan mana yang kawan, tentu Kabir bukanlah kawan.

Berbeda dengan Filipina yang gerakan demokratis nasional rakyatnya sudah besar. Maka untuk menciptakan situasi demikian, perlu sekiranya menciptakan syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Sama seperti kawan-kawan di Filipina atau bahkan dahulu sekali jika berbicara soal revolusi bolshevik atau revolusi Tiongkok, yakni memperluas dan memperbesar perjuangan demokrasi nasional, serta memperkuat persatuan dan persekutuan rakyat tertindas. Kita tak mungkin melewati tahapan-tahapan dalam menciptakan syarat-syarat tersebut. Karenanya, pembebasan rakyat dari belenggu dominasi Imperialisme dan feodalisme bukanlah hal yang cepat melainkan perjuangan panjang rakyat, tapi bukan artinya tidak mungkin terjadi. Karena sejarah telah membuktikan dan di setiapnya ada oto kritik yang harus kita jalankan, begitu juga nanti penerus perjuangan kita kelak yang juga akan mengotokritik kegagalan-kegagalan kita hari ini dalam berjuang untuk mencapai kemenangan nanti.

Sekali lagi keadaan sosial menciptakan kesadaran sosial. Maka ciptakan syarat itu dengan

menyadarkan, mengorganisir dan menggerakkan! Bersama klas buruh dan kaum tani melawan 3 musuh rakyat, yakni Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalisme Birokrat.

Akan tiba saatnya rakyat yang menjadi hakim. Pengadilan rakyat adalah pengadilan yang paling pedih dan menyakitkan, bahkan jauh menyeramkan dibanding pengadilan-pengadilan negara yang memenjara kaum tani karena perjuangannya mempertahankan tanah dan haknya!

Salam demokrasi!

-Asterlyta Putrinda, pembantunya kaum tani.